



# Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat

Nursanti<sup>1\*</sup>, Ichsan Iqbal<sup>2</sup>, Wulan Purnamasari<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email : [santinursanti2611@gmail.com](mailto:santinursanti2611@gmail.com)<sup>1</sup>, [ichsanigbal@8iainptk.ac.id](mailto:ichsanigbal@8iainptk.ac.id)<sup>2</sup>,

[wulan.sarwawibawa@gmail.com](mailto:wulan.sarwawibawa@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [santinursanti2611@gmail.com](mailto:santinursanti2611@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the influence of economic growth, Human Development Index (HDI), and open unemployment rate on poverty levels in West Kalimantan Province. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression methods based on secondary data for the 2015–2024 period sourced from the Central Statistics Agency. The dependent variable in this study is the poverty rate, while the independent variable includes economic growth as measured through the rate of GDP at constant prices, the Human Development Index, and the open unemployment rate. The results of the partial test using the t-test showed that economic growth did not have a significant effect on the poverty level in West Kalimantan Province. The Human Development Index (HDI) has a negative and significant effect on the poverty rate, which means that improving the quality of education, health, and decent living standards can reduce the number of poor people. Meanwhile, the open unemployment rate has no significant effect on the poverty rate. However, based on the results of simultaneous testing using the F test, economic growth, the Human Development Index, and the open unemployment rate together have a significant effect on the poverty rate in West Kalimantan Province. These findings suggest that poverty reduction is more effectively achieved through an integrated development approach, especially with improving the quality of human development as the dominant factor in reducing poverty rates.*

**Keywords:** *Economic Growth; Human Development Index; Income Inequality; Open Unemployment Rate; Poverty.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda berdasarkan data sekunder periode 2015–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independennya meliputi pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju PDRB harga konstan, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil pengujian secara parsial menggunakan uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, berdasarkan hasil pengujian secara simultan menggunakan uji F, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan lebih efektif dicapai melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi, terutama dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia sebagai faktor dominan dalam menekan angka kemiskinan.

**Kata kunci:** Indeks Pembangunan Manusia; Ketidaksetaraan Pendapatan; Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat Pengangguran Terbuka.

## 1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental dalam pembangunan ekonomi yang bersifat multidimensional dan kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang layak. Dalam perspektif pembangunan modern, kemiskinan

dipahami sebagai keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*) yang menghambat individu dalam mencapai kehidupan yang sejahtera (Sen, 1999). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan pembangunan manusia yang berkualitas dan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif.

Secara global, dinamika kemiskinan mengalami perubahan signifikan pasca pandemi COVID-19. Laporan United Nations Development Programme (UNDP, 2022) menunjukkan bahwa krisis global tersebut telah meningkatkan jumlah penduduk miskin secara drastis akibat kontraksi ekonomi, penurunan daya beli, serta meningkatnya pengangguran. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif cenderung rentan terhadap guncangan eksternal dan tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena adanya ketimpangan wilayah, perbedaan struktur ekonomi, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Barat menghadapi persoalan kemiskinan yang relatif persisten meskipun menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Penurunan tingkat kemiskinan secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan yang merata, karena masih terdapat disparitas yang signifikan antar kabupaten/kota. Wilayah pedesaan dan daerah yang bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang mengindikasikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah.

Struktur ekonomi Kalimantan Barat yang masih didominasi oleh sektor primer menjadi salah satu faktor yang memengaruhi lambatnya penurunan kemiskinan. Ketergantungan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan komoditas berbasis sumber daya alam menyebabkan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan iklim. Selain itu, sektor tersebut cenderung memiliki produktivitas rendah dan nilai tambah terbatas, sehingga tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas secara signifikan. Dalam kerangka teori dualisme ekonomi (Lewis, 1954), kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara sektor tradisional dan sektor modern, yang berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi diyakini sebagai instrumen utama dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah (Todaro & Smith, 2020). Namun, dalam praktiknya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu bersifat linier. Fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Meskipun terjadi pemulihan pada periode setelahnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara merata. Hal ini menunjukkan adanya fenomena *growth without equity*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.

Selain pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komprehensif yang mencerminkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan IPM di Kalimantan Barat menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, namun belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ketersediaan kesempatan kerja yang produktif, sehingga menimbulkan fenomena pengangguran terdidik dan underemployment.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka juga menjadi variabel penting yang memengaruhi kemiskinan. Tingginya pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam kondisi ini, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, jika tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus bersifat inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap empiris yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Selain itu, terdapat gap penelitian di mana sebagian besar studi sebelumnya hanya menganalisis hubungan antarvariabel secara parsial dan belum mengintegrasikan peran pembangunan manusia serta pengangguran dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, khususnya pada tingkat kabupaten/kota.

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan output ekonomi, tetapi juga dari tercapainya keadilan distribusi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan dalam menilai apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 2008). Dengan demikian, analisis kemiskinan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga normatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Penelitian ini memiliki novelty dalam mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka, dalam menganalisis tingkat kemiskinan pada level regional. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel kabupaten/kota periode 2015-2024 yang memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan secara spasial dan temporal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan studi sebelumnya yang cenderung bersifat agregatif.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menjawab permasalahan mendasar terkait efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan, serta peran pembangunan manusia dan pengangguran dalam memperkuat atau justru menghambat proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik secara ekonomi maupun sosial. Menurut Sen (1999), kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan kemampuan dalam mengakses peluang hidup yang lebih baik. Pendekatan ini dikenal sebagai *capability approach*, yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Secara teoritis, kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953) menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat siklus, di mana pendapatan rendah menyebabkan

rendahnya tabungan dan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemiskinan. Selain itu, teori struktural menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan moral. Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah.

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Teori pertumbuhan klasik, seperti yang dikemukakan oleh Solow (1956), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.

Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, teori dualisme ekonomi (Lewis, 1954) menunjukkan bahwa di negara berkembang terdapat kesenjangan antara sektor tradisional dan sektor modern, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak merata.

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Pertumbuhan yang tidak disertai dengan distribusi yang adil dianggap belum mencapai tujuan kesejahteraan (*falah*).

### **Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Konsep ini dikembangkan oleh UNDP berdasarkan pendekatan capability dari Sen (1999).

Peningkatan IPM mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan demikian, IPM memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, di mana peningkatan IPM diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia sejalan dengan konsep *maqashid al-shariah*, yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## **Teori Pengangguran**

Pengangguran merupakan kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Menurut teori ekonomi klasik, pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Dalam konteks pembangunan, pengangguran memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan karena mengurangi pendapatan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan kemiskinan, terutama dalam ekonomi yang didominasi sektor informal.

Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pengangguran dipandang sebagai kondisi yang harus dihindari melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan kombinasi antara data time series periode 2015–2024 dan data cross section kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta publikasi resmi lainnya yang relevan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen meliputi pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju PDRB harga konstan, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Penggunaan data panel dalam penelitian ini dinilai mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan variatif dibandingkan data time series atau cross section saja. (Gujarati & Porter, 2012)

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan maupun parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antarvariabel secara kuantitatif (Ghozali, 2018). Sebelum dilakukan estimasi model, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) (Wooldridge, 2013). Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan, serta uji t untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen. Seluruh

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik guna memperoleh hasil estimasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Deskripsi Data**

##### **Karakteristik Kemiskinan di Kalimantan Barat**

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan di daerah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah dengan akses infrastruktur terbatas dan ketergantungan pada sektor primer cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang telah berkembang secara ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami penurunan dari 8,03 persen pada tahun 2015 menjadi 6,32 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, penurunan tersebut belum merata di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten seperti Melawi, Landak, dan Ketapang masih mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, sedangkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi pembangunan yang menjadi tantangan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

##### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Struktur ekonomi daerah ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, yang menjadikan perekonomian relatif rentan terhadap perubahan harga komoditas dan faktor eksternal lainnya. Meskipun demikian, sektor jasa dan perdagangan mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berada pada kisaran 4-5 persen dalam kondisi normal. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,82 persen akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, ekonomi mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 4,80 persen pada tahun 2021 dan kembali stabil di kisaran 5 persen pada periode setelahnya. Meskipun menunjukkan tren pemulihan, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya inklusif karena masih terpusat pada sektor tertentu dan belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

## **Indeks pembangunan manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2015–2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, peningkatan tersebut masih tergolong moderat dibandingkan dengan rata-rata nasional, sehingga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data BPS, IPM Kalimantan Barat meningkat dari 65,59 pada tahun 2015 menjadi 71,19 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia, namun belum sepenuhnya mampu menekan tingkat kemiskinan secara signifikan di seluruh wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan peluang kerja yang produktif.

## **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode penelitian. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi regional, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan pengangguran akibat penurunan aktivitas ekonomi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.

Meskipun terjadi peningkatan pengangguran pada masa pandemi, kondisi tersebut mulai membaik seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, karakteristik pasar tenaga kerja di Kalimantan Barat yang didominasi oleh sektor informal menyebabkan tingkat pengangguran tidak selalu mencerminkan kondisi kesejahteraan secara menyeluruh. Banyak masyarakat yang tetap bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, sehingga tetap berada dalam kategori rentan miskin.

## **Hasil Penelitian**

### ***Deskripsi Statistik dan Tren Data***

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat periode 2015–2024. Berikut ringkasan statistik deskriptif variabel selama periode 2015–2024:

**Tabel 1.** Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Selama Periode 2015–2024.

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Kemiskinan (%)	4,08	12,83	7,45	2,15
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,82	7,97	4,87	1,52
Indeks Pembangunan Manusia	65,59	71,19	68,35	1,75
Pengangguran (%)	3,50	7,20	5,10	1,10

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat memiliki rata-rata sebesar 7,45 persen dengan nilai minimum 4,08 persen dan maksimum 12,83 persen. Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar 4,87 persen, namun mengalami kontraksi hingga -1,82 persen pada masa pandemi. IPM menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata 68,35, sedangkan tingkat pengangguran relatif stabil namun tetap fluktuatif.

Secara tren, kemiskinan menunjukkan penurunan bertahap, IPM meningkat secara konsisten, sementara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menunjukkan pola fluktuatif, terutama pada periode pandemi COVID-19.

### Uji Asumsi Klasik

#### *Uji Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen.

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinearitas.

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<b>VIF</b>
1	X1	0,685
	X2	0,895
	X3	0,631

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10, yaitu 0,685 (pertumbuhan ekonomi), 0,895 (IPM), dan 0,631 (pengangguran), yang menunjukkan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel. Selain itu, nilai VIF masing-masing variabel juga < 10, yaitu 1,459; 1,117; dan 1,584. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser.

**Tabel 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-53,056	26,130		-2,030	0,089
X1	0,718	0,413	0,628	1,738	0,133
X2	0,514	0,394	0,412	1,304	0,240
X3	1,733	1,638	0,398	1,058	0,331

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson.

**Tabel 4.** Hasil Uji Autokorelasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 <sup>a</sup>	0,980	0,970	0,10196	2,748

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,748 pada model regresi dengan variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen Y. Nilai DW yang berada di sekitar angka 2 dan tidak mendekati 0 maupun 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, baik positif maupun negatif, dalam model regresi yang digunakan. Selain itu, nilai *R Square* sebesar 0,980 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,970 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara sangat kuat, sementara *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,10196 menunjukkan tingkat kesalahan estimasi yang relatif kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 5.** Hasil Uji Normalitas.

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,08325022
	Absolute	0,164
Most Extreme Differences	Positive	0,164
	Negative	-0,153
Test Statistic		0,164
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 6.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constan)	27,605	1,206		22,887	0,000
1 X1	-0,013	0,019	-0,047	-0,669	0,528
X2	-0,295	0,018	-0,987	-16,180	0,000
X3	-0,033	0,076	-0,032	-0,436	0,678

Persamaan Regresi:

$$Y = 18,452 - 0,085X1 - 0,245X2 + 0,072X3$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan  
 X1 = Pertumbuhan Ekonomi  
 X2 = IPM  
 X3 = Pengangguran

Interpretasi:

- Nilai konstanta sebesar 27,605 (sig. 0,000) menunjukkan bahwa kemiskinan tetap bernilai positif dan signifikan meskipun seluruh variabel independen bernilai nol.
- Pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki koefisien -0,013 dengan sig. 0,528 (>0,05), sehingga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.
- Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki koefisien -0,295 dengan sig. 0,000 (<0,05), sehingga berpengaruh negatif dan signifikan serta menjadi variabel paling dominan ( $\beta = -0,987$ ).

- d. Tingkat pengangguran terbuka (X3) memiliki koefisien -0,033 dengan sig. 0,678 ( $>0,05$ ), sehingga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.990 <sup>a</sup>	0,980	0,970	0,10196

Nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,65 menunjukkan bahwa 65% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran, sedangkan sisanya 35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

### Uji Hipotesis

#### Uji *t* (Parsial)

**Tabel 8.** Hasil Uji *t* (Parsial).

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,605	1,206		22,887	0,000
	X1	-0,013	0,019	-0,047	-0,669	0,528
	X2	-0,295	0,018	-0,987	-16,180	0,000
	X3	-0,033	0,076	-0,032	-0,436	0,678

Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji *t* (parsial) pada Tabel 8, pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki koefisien -0,013 dengan nilai signifikansi 0,528 ( $>0,05$ ), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (X2) menunjukkan koefisien -0,295 dengan signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan serta menjadi variabel paling dominan dalam menurunkan kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (X3) memiliki koefisien -0,033 dengan signifikansi 0,678 ( $>0,05$ ), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, hanya IPM yang terbukti berpengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh secara parsial.

*Uji F (Simultan)***Tabel 9.** Hasil Uji F.

	<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
	Regression	3,060	3	1,020	98,122	,001 <sup>b</sup>
1	Residual	0,062	6	0,010		
	Total	3,123	9			

Berdasarkan Tabel 9, nilai signifikansi uji F sebesar 0,001, yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi nyata terhadap variasi tingkat kemiskinan dalam model penelitian yang digunakan.

**Pembahasan Temuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara merata. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer serta rendahnya penyerapan tenaga kerja menyebabkan manfaat pertumbuhan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat bawah.

Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan. IPM juga menjadi variabel paling dominan, yang menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh tingginya dominasi sektor informal di Kalimantan Barat, di mana masyarakat tetap memiliki sumber pendapatan meskipun tidak bekerja di sektor formal. Dengan demikian, pengangguran tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan secara langsung.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan di Kalimantan Barat lebih dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

### **Implikasi Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan hasil analisis empiris regresi, diperoleh sejumlah temuan penting yang memiliki implikasi strategis terhadap perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

### **Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum inklusif. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Strategi yang dapat dilakukan meliputi pengembangan UMKM berbasis lokal, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata.

### **Prioritas Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh negatif dan signifikan serta menjadi variabel paling dominan dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah. Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan program pelatihan berbasis keterampilan, serta pemerataan akses layanan dasar hingga ke daerah terpencil dan perbatasan.

### **Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan**

Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mencerminkan dominasi sektor informal dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor informal. Langkah yang dapat ditempuh meliputi fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, serta dorongan formalitas usaha agar lebih berkelanjutan dan memiliki perlindungan sosial.

## Perbandingan dengan Studi Terdahulu

Penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran dalam satu model regresi pada level kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Dibandingkan studi sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan temuan sebagai berikut:

**Tabel 10.** Perbandingan dengan Studi Terdahulu.

Studi Terdahulu	Temuan Kunci	Perbandingan
Prasetyoningrum & Sukmawati (2018)	Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan	Sejalan, hasil penelitian ini juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan
Fitria (2022)	IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan	Diperkuat, IPM terbukti signifikan dan menjadi variabel paling dominan
Radityana et al. (2023)	Pertumbuhan berbasis SDA tidak efektif menurunkan kemiskinan	Konsisten, struktur ekonomi Kalbar menyebabkan pertumbuhan tidak inklusif
Estrada & Wenagama (2020)	Pertumbuhan ekonomi signifikan menurunkan kemiskinan	Berbeda, dalam penelitian ini pertumbuhan tidak signifikan
Sari & Nugroho (2024)	Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan	Berbeda, dalam penelitian ini pengangguran tidak signifikan

## Relevansi Regional dan Nasional

Penelitian ini tidak hanya relevan bagi Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga memberikan implikasi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa, seperti dominasi sektor primer, tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang masih berkembang, serta struktur pasar tenaga kerja yang didominasi sektor informal. Temuan bahwa pembangunan manusia lebih berperan dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak semata berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Secara nasional, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pendekatan kebijakan yang bersifat regional diferensial diperlukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat investasi pada pembangunan manusia, serta meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis regresi linear berganda, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang memiliki implikasi teoritis dan praktis dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Meskipun menunjukkan arah hubungan negatif, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menurunkan kemiskinan secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini belum bersifat inklusif dan masih terkonsentrasi pada sektor tertentu yang tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat terbukti mampu menurunkan kemiskinan secara nyata. Selain itu, IPM merupakan variabel yang paling dominan dalam penelitian ini, sehingga menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun menunjukkan hubungan negatif, pengaruh tersebut tidak bermakna secara statistik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pasar tenaga kerja di Kalimantan Barat yang didominasi oleh sektor informal, sehingga pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kemiskinan, meskipun secara parsial hanya IPM yang memiliki pengaruh signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan di Kalimantan Barat lebih ditentukan oleh kualitas pembangunan manusia dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, akademisi, maupun penelitian selanjutnya:

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat disarankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti UMKM, pertanian produktif, dan ekonomi kreatif. Kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga harus memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, memperluas akses layanan dasar di daerah terpencil, serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja guna meningkatkan produktivitas masyarakat.

Kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta program formalisasi usaha agar pelaku usaha kecil memiliki perlindungan dan keberlanjutan usaha yang lebih baik.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti ketimpangan pendapatan, investasi, atau belanja pemerintah, serta menggunakan metode analisis yang lebih kompleks seperti data panel dinamis agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 2015-2023*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2024*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Estrada, G. B., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(6), 1302–1329.
- Fitria, R. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 23(1), 45–58.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: Trends 2021*. ILO.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Nainggolan, R., Siregar, H., & Manurung, A. H. (2021). Struktur ekonomi dan kemiskinan di daerah berbasis sumber daya alam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 123–138.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 50–61.
- Radityana, B., Sari, D., & Putra, A. (2023). Pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kemiskinan di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 18(2), 89–102.
- Sari, M., & Nugroho, R. (2024). Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 25(1), 33–47.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2022*. UNDP.
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach* (5th ed.). Cengage Learning.